

Analisis Teori Organisasi Dalam Konteks Administratif Negara: Kajian Literatur Pada Dinamika Tata Kelola Pemerintahan Di Sulawesi Tengah

Mini

Ilmu Administrasi Negara/Publik, STIA Panca Marga Palu

Corresponding Author: mininasir296@gmail.com

Published: June, 2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan teori organisasi dalam konteks administrasi negara dengan fokus pada dinamika tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah melalui pendekatan penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian adalah memahami bagaimana teori organisasi dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori organisasi, khususnya pendekatan struktural dan manajemen strategis, membantu mengidentifikasi tantangan birokrasi seperti hierarki kaku dan inefisiensi administrasi. *E-governance* berpotensi meningkatkan aksesibilitas layanan publik, tetapi terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Prinsip *good governance*, termasuk transparansi dan partisipasi masyarakat, menjadi kunci untuk tata kelola yang inklusif, meskipun partisipasi masyarakat masih rendah. Manajemen strategis dan resiliensi digital mendukung adaptasi terhadap perubahan teknologi, sementara penguatan sistem pengendalian internal diperlukan untuk mengatasi korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi teori organisasi dengan teknologi dan pendekatan partisipatif dapat menciptakan tata kelola yang responsif dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Saran meliputi restrukturisasi birokrasi, penguatan *e-governance*, dan peningkatan partisipasi masyarakat

Kata Kunci: Administrasi Negara, *E-Governance*, *Good Governance*, Teori Organisasi, Tata Kelola Pemerintahan

Abstract

This study analyzes the application of organizational theory in the context of public administration, focusing on the dynamics of governance in Central Sulawesi through a library research approach. The aim is to understand how organizational theory can enhance governance effectiveness in the region. Findings reveal that organizational theory, particularly structural and strategic management approaches, identifies bureaucratic challenges such as rigid hierarchies and administrative inefficiencies. E-governance has the potential to improve public service accessibility but is hindered by infrastructure and human resource limitations. Good governance principles, including transparency and public participation, are essential for inclusive governance, though community engagement remains low. Strategic management and digital resilience support adaptation to technological changes, while stronger internal controls are needed to address corruption. The study concludes that integrating organizational theory with technology and participatory approaches can foster responsive and sustainable governance in Central Sulawesi. Recommendations include bureaucratic restructuring, strengthening e-governance, and enhancing public participation.

Keywords: *E-Governance, Good Governance, Organizational Theory, Public Administration, Public Governance*

PENDAHULUAN

Tata kelola pemerintahan yang efektif merupakan salah satu pilar utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam konteks global, tata kelola pemerintahan tidak hanya mencakup pengelolaan sumber daya, tetapi juga melibatkan dinamika organisasi, administrasi negara, dan partisipasi masyarakat untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan. Teori organisasi, sebagai landasan analisis, memainkan peran kunci dalam memahami bagaimana struktur, hierarki, dan proses dalam organisasi publik memengaruhi implementasi kebijakan dan pengelolaan pemerintahan (Lynn et al., 2000). Pendekatan ini memberikan kerangka yang kuat untuk menganalisis interaksi antara elemen-elemen organisasi dengan praktik administrasi negara, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas tata kelola pemerintahan.

Di Indonesia, administrasi negara menghadapi tantangan kompleks, terutama dalam mengintegrasikan pendekatan modern seperti e-governance dengan struktur birokrasi tradisional. E-governance, misalnya, telah terbukti mampu merevolusi pengelolaan pemerintahan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan dan partisipasi publik (Charliyan, 2023). Selain itu, konsep tata kelola yang baik (*good governance*) menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem administrasi publik (Novitasari & Hilmiawan, 2024). Namun, penerapan prinsip-prinsip ini sering kali terhambat oleh faktor struktural, seperti hierarki yang kaku dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia, sebagaimana dijelaskan dalam teori struktural oleh Latif (2023).

Sulawesi Tengah, sebagai salah satu provinsi di Indonesia, menghadapi tantangan unik dalam tata kelola pemerintahan karena keberagaman geografis, sosial, dan politiknya. Provinsi ini memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga menghadapi isu seperti korupsi, rendahnya efisiensi administrasi, dan kebutuhan akan peningkatan kapasitas birokrasi (Wartiningsih, 2021). Penelitian oleh Nuh (2019) menunjukkan bahwa proses manajemen strategis memiliki dampak signifikan terhadap implementasi tata kelola daerah yang baik, yang relevan untuk diterapkan di Sulawesi Tengah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pendekatan partisipatif dalam tata kelola, sebagaimana diuraikan oleh Jiménez et al. (2019), dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal, yang sangat penting mengingat keragaman komunitas di Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut, transformasi digital dalam administrasi publik, seperti penerapan e-government, menjadi semakin relevan di Sulawesi Tengah untuk mengatasi tantangan birokrasi dan meningkatkan aksesibilitas layanan (Andriyan et al., 2024). Namun, keberhasilan transformasi ini bergantung pada kemampuan organisasi publik untuk mengadopsi kerangka tata kelola yang adaptif dan resilien, sebagaimana disoroti oleh Salam et al. (2024). Oleh karena itu, memahami dinamika tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah melalui lensa teori organisasi dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang cara meningkatkan efektivitas administrasi negara.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana teori organisasi dapat digunakan untuk memahami dinamika tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah dalam konteks administrasi negara. Dengan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), kajian ini akan mengintegrasikan berbagai perspektif teoritis dan empirik untuk menghasilkan

rekomendasi yang dapat memperkuat praktik tata kelola di wilayah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif di Sulawesi Tengah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena sifatnya yang mendalam dalam menganalisis dan memahami konsep-konsep teoritis serta dinamika tata kelola pemerintahan melalui lensa teori organisasi dan administrasi negara. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis informasi dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik, yang berkaitan dengan teori organisasi, administrasi negara, tata kelola pemerintahan, dan konteks Sulawesi Tengah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan. Sumber data meliputi:

1. Jurnal ilmiah dan artikel akademik yang membahas teori organisasi, administrasi negara, dan tata kelola pemerintahan, baik dalam konteks global maupun lokal, termasuk studi yang relevan dengan Sulawesi Tengah.
2. Buku teks dan referensi yang memberikan landasan teoritis tentang organisasi publik, *e-governance*, *good governance*, dan manajemen strategis.
3. Dokumen resmi dan laporan yang berkaitan dengan praktik tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah, seperti laporan pemerintah daerah atau studi kasus.

Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas akademik, dan aktualitas, dengan memprioritaskan literatur yang diterbitkan dalam rentang 15 tahun terakhir untuk memastikan kebaruan informasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Identifikasi literatur: Mencari sumber literatur menggunakan kata kunci seperti "Teori Organisasi," "Administrasi Negara," "Tata Kelola Pemerintahan," dan "Sulawesi Tengah" pada basis data akademik seperti Google Scholar, JSTOR, atau repositori jurnal lokal seperti portal Garuda.
2. Seleksi literatur: Memilih literatur yang relevan berdasarkan kriteria, seperti fokus pada tata kelola pemerintahan, administrasi publik, atau studi kasus di Sulawesi Tengah, serta memiliki metodologi yang jelas dan rujukan yang kredibel.
3. Pengumpulan data: Mencatat informasi penting dari setiap sumber, termasuk teori, temuan empiris, dan implikasi untuk tata kelola di Sulawesi Tengah, menggunakan teknik pencatatan sistematis seperti anotasi atau tabel ringkasan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deduktif, yang berfokus pada penerapan teori organisasi untuk memahami dinamika tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Klasifikasi data: Mengelompokkan data berdasarkan tema utama, seperti teori organisasi (misalnya, teori struktural), konsep *good governance*, *e-governance*, dan tantangan tata kelola di Sulawesi Tengah.
2. Analisis tematik: Mengidentifikasi pola atau hubungan antar-tema, seperti bagaimana struktur organisasi memengaruhi efisiensi administrasi atau bagaimana *e-governance* meningkatkan partisipasi publik.
3. Sintesis: Mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber untuk membangun argumen yang koheren tentang bagaimana teori organisasi dapat diterapkan dalam konteks administrasi negara di Sulawesi Tengah.

4. Interpretasi: Menarik kesimpulan berdasarkan analisis, dengan mempertimbangkan implikasi teoritis dan praktis untuk pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai jenis literatur (jurnal, buku, dan laporan) guna memverifikasi konsistensi dan keakuratan temuan. Selain itu, penelitian hanya menggunakan sumber-sumber yang memiliki kredibilitas akademik tinggi, seperti publikasi yang telah melalui proses peer-review atau diterbitkan oleh institusi terpercaya. Proses seleksi literatur juga dilakukan secara transparan dengan mendokumentasikan kriteria inklusi dan eksklusi untuk meminimalkan bias.

HASIL

Penelitian ini menganalisis penerapan teori organisasi dalam konteks administrasi negara dengan fokus pada dinamika tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah melalui pendekatan penelitian kepustakaan. Berdasarkan analisis literatur, berikut adalah temuan utama yang dikelompokkan ke dalam beberapa tema kunci:

1. Peran Teori Organisasi dalam Administrasi Negara

Teori organisasi memberikan kerangka penting untuk memahami struktur dan dinamika organisasi publik di Sulawesi Tengah. Lynn et al. (2000) menyoroti bahwa pendekatan ekonomi politik dalam teori organisasi membantu menganalisis bagaimana struktur tata kelola memengaruhi implementasi kebijakan. Dalam konteks Sulawesi Tengah, teori struktural, seperti yang dibahas oleh Latif (2023), menunjukkan bahwa hierarki dan pembagian kerja dalam birokrasi pemerintahan daerah sering kali menghambat fleksibilitas, tetapi juga memberikan stabilitas dalam pengambilan keputusan. Struktur organisasi yang kaku ini menjadi tantangan utama dalam meningkatkan efisiensi administrasi di provinsi ini, terutama karena keberagaman geografis dan sosial yang memerlukan pendekatan yang lebih adaptif.

2. Kontribusi *E-Governance* terhadap Tata Kelola Pemerintahan

Penerapan e-governance telah mengubah lanskap administrasi negara di Sulawesi Tengah. Charliyan (2023) menegaskan bahwa teknologi informasi, seperti sistem pelayanan daring, meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan partisipasi masyarakat. Di Sulawesi Tengah, *e-governance* berpotensi mengatasi hambatan geografis, memungkinkan masyarakat di daerah terpencil untuk berinteraksi dengan pemerintah daerah. Namun, Andriyan et al. (2024) mencatat bahwa keberhasilan *e-governance* bergantung pada infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia, yang masih menjadi kendala di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, penguatan kapasitas digital diperlukan untuk memaksimalkan manfaat *e-governance*.

3. Prinsip Good Governance dan Partisipasi Masyarakat

Prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, menjadi elemen kunci dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah. Novitasari dan Hilmiawan (2024) menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa mendorong pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks Sulawesi Tengah, Jiménez et al. (2019) menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal dapat menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan publik. Namun, Makalalag et al. (2023) mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih terbatas karena

kurangnya kesadaran dan mekanisme formal untuk melibatkan pemangku kepentingan, sehingga diperlukan strategi yang lebih proaktif untuk memperkuat partisipasi.

4. Manajemen Strategis dan Resiliensi Tata Kelola

Manajemen strategis memainkan peran penting dalam mendukung tata kelola yang efektif. Nuh (2019) menunjukkan bahwa proses manajemen strategis yang terarah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Di Sulawesi Tengah, pendekatan ini relevan untuk mengatasi tantangan seperti pengelolaan sumber daya alam dan efisiensi anggaran. Selain itu, Salam et al. (2024) menyoroti pentingnya resiliensi digital dalam tata kelola pemerintahan, terutama untuk menjaga stabilitas layanan di era transformasi digital. Temuan ini mengindikasikan bahwa Sulawesi Tengah perlu mengintegrasikan perencanaan strategis dengan strategi resiliensi untuk menghadapi perubahan teknologi dan lingkungan.

5. Tantangan dan Peluang dalam Tata Kelola Sulawesi Tengah

Literatur menunjukkan bahwa Sulawesi Tengah menghadapi sejumlah tantangan dalam tata kelola pemerintahan, termasuk risiko korupsi, rendahnya efisiensi birokrasi, dan keterbatasan sumber daya (Wartiningsih, 2021). Kawedar et al. (2019) menambahkan bahwa sistem pengendalian internal yang lemah dapat memperburuk kinerja keuangan organisasi publik. Namun, peluang seperti penerapan *e-government*, pelatihan kapasitas bagi aparatur desa (Putra et al., 2024), dan pendekatan partisipatif menawarkan solusi potensial untuk meningkatkan efektivitas tata kelola. Keberagaman sosial dan geografis Sulawesi Tengah juga dapat menjadi aset jika dikelola dengan kerangka tata kelola yang inklusif dan adaptif.

6. Implikasi Teori Organisasi untuk Sulawesi Tengah

Analisis literatur mengungkapkan bahwa teori organisasi, khususnya teori struktural dan pendekatan manajemen strategis, dapat digunakan untuk merancang kerangka tata kelola yang lebih efektif di Sulawesi Tengah. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyeimbangkan stabilitas birokrasi dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk merespons kebutuhan masyarakat. Selain itu, integrasi konsep *good governance* dan teknologi modern, seperti yang diusulkan oleh Patón-Romero et al. (2021), dapat mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, yang sangat relevan mengingat tantangan lingkungan di Sulawesi Tengah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori organisasi dalam konteks administrasi negara dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang cara meningkatkan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah. Dengan mengintegrasikan *e-governance*, prinsip *good governance*, manajemen strategis, dan partisipasi masyarakat, Sulawesi Tengah dapat mengembangkan sistem tata kelola yang lebih responsif, transparan, dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Tabel Temuan

Berikut adalah temuan utama dari penelitian yang disusun dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai hasil analisis literatur terkait penerapan teori organisasi dalam konteks administrasi negara dan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah.

Tabel 1. Temuan Penelitian

Tema	Temuan Utama	Sumber
Peran Teori Organisasi	Teori organisasi, khususnya pendekatan ekonomi politik dan teori struktural, membantu menganalisis struktur birokrasi di Sulawesi Tengah. Hierarki yang kaku memberikan stabilitas namun menghambat fleksibilitas administrasi.	Lynn et al. (2000); Latif (2023)
<i>E-Governance</i>	E-governance meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan partisipasi masyarakat di Sulawesi Tengah, tetapi terbatas oleh infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia.	Charliyan (2023); Andriyan et al. (2024)
<i>Good Governance</i> dan Partisipasi	Prinsip good governance seperti transparansi dan partisipasi mendorong tata kelola yang inklusif, namun partisipasi masyarakat masih rendah karena kurangnya mekanisme formal.	Novitasari & Hilmiawan (2024); Jiménez et al. (2019); Makalalag et al. (2023)
Manajemen Strategis dan Resiliensi	Manajemen strategis mendukung pelayanan publik yang efektif, sementara resiliensi digital diperlukan untuk menghadapi transformasi teknologi di Sulawesi Tengah.	Nuh (2019); Salam et al. (2024)
Tantangan dan Peluang	Tantangan meliputi korupsi, inefisiensi birokrasi, dan lemahnya pengendalian internal. Peluang mencakup <i>e-government</i> , pelatihan aparatur, dan pendekatan partisipatif.	Wartiningsih (2021); Kawedar et al. (2019); Putra et al. (2024)
Implikasi Teori Organisasi	Teori organisasi mendukung rancangan tata kelola yang seimbang antara stabilitas dan fleksibilitas, dengan integrasi <i>good governance</i> dan teknologi untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.	Patón-Romero et al. (2021)

Sumber : Data diolah

Tabel di atas merangkum temuan kunci yang menjadi dasar untuk memahami bagaimana teori organisasi dapat diterapkan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang yang relevan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkap bagaimana teori organisasi dapat menjadi lensa analitis yang kuat untuk memahami dinamika administrasi negara dan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah. Berdasarkan temuan yang telah disusun, pembahasan ini mengelaborasi implikasi teoritis dan praktis dari penerapan teori organisasi, dengan mempertimbangkan konteks lokal Sulawesi Tengah serta tantangan dan peluang yang ada.

1. Teori Organisasi sebagai Landasan Analisis Tata Kelola

Teori organisasi, khususnya pendekatan ekonomi politik (Lynn et al., 2000) dan teori struktural (Latif, 2023), menawarkan kerangka untuk menganalisis struktur birokrasi di Sulawesi Tengah. Struktur hierarkis dalam organisasi publik memberikan stabilitas dalam pengambilan keputusan, tetapi sering kali menghambat fleksibilitas yang diperlukan untuk merespons kebutuhan masyarakat yang beragam. Di Sulawesi Tengah, keberagaman geografis dan sosial menuntut pendekatan organisasi yang lebih adaptif. Misalnya, birokrasi yang kaku dapat memperlambat respons terhadap isu lingkungan atau kebutuhan masyarakat di daerah terpencil. Oleh karena itu, teori organisasi

menyarankan perlunya restrukturisasi organisasi publik yang memadukan stabilitas dengan fleksibilitas, seperti dengan mengurangi lapisan hierarki atau meningkatkan koordinasi antar unit.

2. Transformasi melalui *E-Governance*

E-governance telah terbukti sebagai alat transformasi dalam administrasi negara (Charliyan, 2023; Andriyan et al., 2024). Di Sulawesi Tengah, penerapan teknologi informasi dapat mengatasi hambatan geografis, memungkinkan akses layanan publik yang lebih luas, terutama di wilayah terpencil. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya literasi digital aparat pemerintah membatasi potensi *e-governance*. Hal ini sejalan dengan temuan Patón-Romero et al. (2021), yang menekankan pentingnya menyelaraskan teknologi dengan tujuan strategis organisasi. Untuk Sulawesi Tengah, investasi dalam infrastruktur digital dan pelatihan sumber daya manusia menjadi prasyarat untuk memaksimalkan manfaat *e-governance*, sekaligus memastikan bahwa teknologi mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas.

3. Pentingnya *Good Governance* dan Partisipasi Masyarakat

Prinsip *good governance*, seperti yang diuraikan oleh Novitasari dan Hilmiawan (2024) serta Jiménez et al. (2019), menegaskan bahwa partisipasi masyarakat adalah kunci untuk tata kelola yang inklusif. Di Sulawesi Tengah, rendahnya partisipasi masyarakat, sebagaimana diidentifikasi oleh Makalalag et al. (2023), menunjukkan perlunya mekanisme formal seperti musyawarah desa atau platform digital untuk melibatkan pemangku kepentingan. Partisipasi yang efektif dapat meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa sumber daya dikelola sesuai kebutuhan lokal, terutama dalam isu seperti pengelolaan sumber daya alam yang sensitif di provinsi ini. Teori organisasi mendukung pendekatan ini dengan menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi dalam struktur organisasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi.

4. Peran Manajemen Strategis dan Resiliensi

Manajemen strategis, sebagaimana dijelaskan oleh Nuh (2019), memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas tata kelola lokal. Di Sulawesi Tengah, pendekatan ini dapat diterapkan untuk mengoptimalkan pengelolaan anggaran dan sumber daya, yang sering kali terhambat oleh inefisiensi birokrasi. Selain itu, resiliensi digital yang ditekankan oleh Salam et al. (2024) menjadi relevan dalam menghadapi transformasi teknologi. Misalnya, sistem *e-governance* yang resilien dapat mencegah gangguan layanan akibat kegagalan teknologi. Dalam konteks teori organisasi, manajemen strategis dan resiliensi mencerminkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, yang sangat penting di Sulawesi Tengah mengingat dinamika sosial dan lingkungan yang kompleks.

5. Mengatasi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang

Tantangan seperti korupsi (Wartiningsih, 2021) dan lemahnya sistem pengendalian internal (Kawedar et al., 2019) menghambat tata kelola yang efektif di Sulawesi Tengah. Teori organisasi menyarankan bahwa penguatan sistem pengendalian internal dapat dilakukan melalui desain organisasi yang mendukung checks and balances, seperti pemisahan tugas dan audit independen. Di sisi lain, peluang seperti pelatihan aparat desa (Putra et al., 2024) dan pendekatan partisipatif menawarkan jalan untuk meningkatkan kapasitas birokrasi. Keberagaman Sulawesi Tengah, jika dikelola dengan

baik melalui kerangka tata kelola yang inklusif, dapat menjadi kekuatan untuk mendorong inovasi dan kolaborasi lintas komunitas.

6. Implikasi untuk Tata Kelola Berkelanjutan

Integrasi teori organisasi dengan prinsip *good governance* dan teknologi modern, seperti yang diusulkan oleh Patón-Romero et al. (2021), menawarkan pendekatan holistik untuk tata kelola berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Misalnya, pengelolaan sumber daya alam dapat ditingkatkan dengan memadukan teknologi pemantauan berbasis data dengan partisipasi masyarakat, sehingga memastikan keberlanjutan lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan sosial. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas organisasi dalam menanggapi tantangan lingkungan, yang merupakan inti dari teori organisasi modern.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa teori organisasi tidak hanya relevan tetapi juga esensial untuk merancang tata kelola pemerintahan yang efektif di Sulawesi Tengah. Dengan mengatasi tantangan struktural, memanfaatkan teknologi, dan memperkuat partisipasi masyarakat, provinsi ini dapat membangun sistem administrasi negara yang responsif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teori organisasi dalam konteks administrasi negara memberikan wawasan mendalam terhadap dinamika tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah. Teori organisasi, khususnya pendekatan ekonomi politik dan teori struktural, membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan struktur birokrasi, di mana hierarki yang kaku memberikan stabilitas namun sering kali menghambat fleksibilitas dalam merespons kebutuhan masyarakat yang beragam. E-governance terbukti sebagai alat transformasi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan partisipasi masyarakat, meskipun implementasinya terbatas oleh infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia. Prinsip *good governance*, seperti transparansi dan partisipasi, menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola yang inklusif, tetapi rendahnya keterlibatan masyarakat menunjukkan perlunya mekanisme yang lebih efektif. Manajemen strategis dan resiliensi digital mendukung efisiensi dan adaptabilitas tata kelola, sementara tantangan seperti korupsi dan inefisiensi birokrasi dapat diatasi melalui penguatan sistem pengendalian internal dan pelatihan aparatur. Secara keseluruhan, integrasi teori organisasi dengan teknologi modern dan pendekatan partisipatif dapat membentuk kerangka tata kelola yang responsif, transparan, dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

SARAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Tengah:

1. Restrukturisasi Organisasi Publik: Pemerintah daerah perlu merancang ulang struktur birokrasi untuk mengurangi hierarki yang kaku, misalnya dengan memperkuat koordinasi antar unit dan mendelegasikan wewenang ke tingkat yang lebih rendah, guna meningkatkan fleksibilitas dan responsivitas.
2. Penguatan Infrastruktur *E-Governance*: Investasi dalam infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet di wilayah terpencil, dan pelatihan literasi digital bagi aparatur pemerintah harus diprioritaskan untuk memaksimalkan manfaat *e-governance*.
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Membangun mekanisme formal, seperti platform digital atau forum musyawarah desa, untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, terutama dalam pengelolaan sumber daya lokal.

4. Pelatihan Manajemen Strategis: Mengadakan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pemerintah daerah tentang manajemen strategis dan resiliensi digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi.
5. Penguatan Sistem Pengendalian Internal: Menerapkan sistem checks and balances yang kuat, seperti audit independen dan pemisahan tugas, untuk meminimalkan risiko korupsi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
6. Penelitian Lanjutan: Penelitian lebih lanjut dengan pendekatan empiris, seperti studi kasus atau wawancara dengan pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah, diperlukan untuk memvalidasi temuan literatur dan mengembangkan solusi yang lebih kontekstual.

Saran-saran ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan inklusif, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Andhika, L. R. (2017). Evolusi Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance dan Open Government. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2). doi:10.22212/jekp.v8i2.867

Andriyan, Y., Rajab, A. M., Pamungkas, A. C., Muhamad, S., & Rahakratat, R. (2024). Transformasi E-Government Menuju Good Governance di Pemerintah Kabupaten Sorong. *Samakta Jurnal Pemerintahan*, 1(2). doi:10.61142/samakta.v1i2.127

Charliyan, A. (2023). Development of Electronic Governance Based Regional Government Management. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 3(01). doi:10.58471/jms.v3i01.1734

Desi Jayanti, N. W. (2023). Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Public Governance di Indonesia. *Journal of Contemporary Public Administration*, 3(2), 51–58. doi:10.22225/jcpa.3.2.2023.51-58

Fitriasari, E. T. (2022). Kebijakan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berdasarkan Perspektif Good Governance di Provinsi Kalimantan Barat. *Khapro*, 3(1). doi:10.62099/khapro.v3i1.26

Jiménez, A., LeDeunff, H., Garriga, R. G., Sjödin, J., Cronk, R., Murad, S., ... Bartram, J. (2019). The Enabling Environment for Participation in Water and Sanitation: A Conceptual Framework. *Water*, 11(2), 308. doi:10.3390/w11020308

Kawedar, W., Sodikin, Handayani, R. S., & Purwanto, A. (2019). Good Governance, Sistem Pengendalian Internal, dan Kinerja Keuangan Organisasi Sektor Publik. *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, 13(2). doi:10.24843/matrik:jmbk.2019.v13.i02.p09

Kristiana, T., Ongki, O., Setiawan, B., Sinta, D. M., Mayesa Tigor, I. G., & Tuah, J. L. (2024). Implementasi Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Rantau Asem Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Sociopolitico*, 6(2). doi:10.54683/sociopolitico.v6i2.138

Latif, N. A. (2023). Teori Struktural dalam Analisis Birokrasi Pemerintahan. doi:10.31219/osf.io/gtx9r

Lynn, L. E., Heinrich, C. J., & Hill, C. J. (2000). Studying Governance and Public Management: Challenges and Prospects. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 10(2), 233–262. doi:10.1093/oxfordjournals.jpart.a024269

Makalalag, F. N., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2023). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(1). doi:10.35794/emba.v11i1.47157

Novitasari, D., & Hilmiawan, G. A. (2024). Analisis Tata Kelola Keuangan Desa Guna Mewujudkan Good Village Governance (Studi di Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul). *Jurnal Ekonomika*. doi:10.35334/jek.v0i0.4837

Nuh, M. (2019). Effect of Strategic Management Process to Implement Good Local Governance: A Comparative Study Between Yogyakarta City, Indonesia and Pattaya City, Thailand. doi:10.2991/aicobpa-18.2019.33

Patón-Romero, J. D., Baldassarre, M. T., Rodríguez, M., & Piattini, M. (2021). Governance and Management of Green IT. In *Green IT Strategies and Applications* (pp. 203–224). doi:10.1007/978-3-030-69970-3_10

Putra, S. J., Zulhadi, Z., Sarah Mandini, D. D., Rahmandari, I. A., Sujudi, A., Arisandy, R., ... Bukhari, A. S. (2024). Pelatihan Tata Kelola Pemerintahan Desa Bentek untuk Perangkat Desa Bentek oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas 45 Mataram. *Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1). doi:10.59896/amal.v2i1.83

Salam, R., Bahasruddin, A., Wijaya, I. D., & Muhammad, F. (2024). Strategi Meningkatkan Resiliensi dalam Tata Kelola Pemerintahan pada Era Digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(2). doi:10.52316/jap.v20i2.437

Wartiningsih, W. (2021). Apakah Tata Kelola Pemerintahan dan Struktur Politik Mampu Menekan Kecenderungan Terjadinya Korupsi di Indonesia? *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 88–106. doi:10.14710/jdep.4.2.88-106